



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

SATPOL PP KOTA MAGELANG
Jl. Letjend Suprpto No.2 Kota Magelang
No. Telp (0293) 366049
Email: Satpolppkotamagelang@gmail.com
Satpolpp.Magelangkota.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KOTA MAGELANG TAHUN 2022	
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG NOMOR 050.4/22/800 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MAGELANG TAHUN 2022	
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	BAB I - 1
1.1. Latar Belakang	BAB I - 1
1.2. Landasan Hukum	BAB I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	BAB I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	BAB I - 6
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TAHUN 2020	 BAB II - 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.....	BAB II - 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	BAB II - 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	BAB II - 22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	BAB II - 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	BAB II - 38
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 BAB III - 25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	BAB III - 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan			
Polisi Pamong Praja.....	BAB III	-	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	BAB III	-	42
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT		
DAERAH.....	BAB IV	-	46
BAB V	PENUTUP.....	BAB V	- 59



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. lokasi; dan
 - d. kelompok sasaran,yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16.845.047.782,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	13.588.888.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6.883.397.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	28.051.629.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6.732.631.000,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	10.032.127.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	32.612.271.000,00
19	Sekretariat DPRD Kota Magelang	30.784.953.000,00
20	Sekretariat Daerah	42.179.996.000,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.762.462.000,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	23.973.153.000,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	18.895.492.000,00
24	Inspektorat Kota Magelang	8.228.302.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	11.103.595.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	30.877.012.000,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	24.635.591.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.969.061.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
	TOTAL	951.912.043.057,00

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Let Jend Suprpto No. 2 ☎ (0293) 366049 Magelang 56126

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG
NOMOR 050.4 / 12 / 800 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 telah disahkan oleh Walikota Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.
- KETIGA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.
- KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2020
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 30 April 2021



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

SINGGIH INDRI PRANGGANA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini disusun sebagai konsekuensi dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota Nomor 050/47/410 tanggal 2 Februari 2021 tentang penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2022.

Rencana Kerja Satpol PP Kota Magelang ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Strategis Kota Magelang Tahun 2021-2022 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan juga sebagai pedoman dalam penentuan program dan kegiatan setiap tahunnya yang akan dilaksanakan guna mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat di Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Rencana Kerja ini nantinya menjadi sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai urusan / kewenangannya yang dituangkan dalam LKPD , LKPJ dan LKJiP yang dapat diukur akuntabilitas kinerja sebagai laporan kepada atasan (Kepala Daerah) dan masyarakat.

6

Magelang, 2021



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

Drs. SINGGIH INDRI PRANGGANA, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19620401 198907 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Untuk mendukung tercapainya perencanaan yang berkualitas maka dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari perencanaan Pembangunan Nasional. Sebab perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut selain mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan lima tahunan keempat dari RPJP Kota Magelang Tahun 2005 – 2025 dan masuk dalam Tahun pertama dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 dimulai dari penyusunan Rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022, dan penambahan adanya anggaran Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Kecamatan Kelurahan Kota Magelang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (RODANYA MASBAGYO). Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah ada pengesahan dari walikota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Penanggulangan bencana kebakaran dan Pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Walikota dalam menegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat .
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota .
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah .
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah / Walikota yang juga disinergikan dengan Renja Satpol PP Propinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja OPD Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda, tanggal 28 Pebruari 2008, perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 / PMK 07/2016 Tentang Penggunaan , Pemantauan , dan Evaluasi Dana Hasil Cukai Tembakau;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana;

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 -2025;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021 – 2022 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan tahunan disusun dengan maksud sebagai :

- a. Pedoman penyusunan KUA – PPAS
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA- OPD)
- c. Pedoman pencapaian target–target kinerja Kepala Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat di tahun 2022
- d. Dasar penilaian akuntabilitas kinerja tahunan

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA – OPD) setiap tahun, agar kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tidak menyimpang dari Renstra OPD maupun RPJMD 2021 – 2026 dan RKPD Kota Magelang Tahun 2022. Adapun tujuan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 adalah :

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 2021 – 2026 , Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
- b. Untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 37 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG NOMOR 050.4/22/800 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG TAHUN 2020

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan / dilaksanakan per tahun. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan Laporan Capaian Kinerja Fisik Keuangan (RFK) dan Laporan Keuangan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja fisik dan keuangan dari setiap program dan kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Magelang Tahun 2020 dihadapkan dengan target yang tercantum pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program/ kegiatan yang tercantum dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun 2020 dapat dilaksanakan semua sehingga semua program/ kegiatan dapat terealisasi.
2. Dari 9 (sembilan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan yang terdapat dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun 2020 dapat dilaksanakan semua dengan kriteria memenuhi dan melebihi target keluaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) kegiatan atau 100%.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TAHUN 2020*)
KOTA MAGELANG

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD sd Tahun 2021) (akhir periode renstra OPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan OPD Tahun Lalu (Tahun) 2020			URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Program / Kegiatan Renstra OPD sd Tahun 2021	
						Target Renja OPD 2020	Realisasi Renja OPD 2020	Tingkat realisasi (%)				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	bulan	12	12	12	12	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	unit	30	30	30	30	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan laporan keuangan dan SPJ	orang	11	11	11	11	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis dan orang	20 dan 2	20 dan 2	20 dan 2	20 dan 2	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	jenis	34	34	34	34	100%	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Tersusunnya DPA Penetapan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	jenis	20	20	20	20	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	jenis dan bulan	2 dan 12	2 dan 12	2 dan 12	2 dan 12	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pelyanan administrasi keuangan, Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatankantor/ lapangan melalui perjanjian/perikatan, Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD, Tersusunnya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaianindikator kinerja	12 Bulan dan 4 Dokumen	12 Bulan dan 4 Dokumen	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	kali	24	24	24	24	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	jenis	6	6	6	6	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemberian gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	orang / giat	50	50	50	50	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan barang akhir tahun	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksananya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	orang	6	6	6	6	100%	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	4 Buku	4 Buku	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	lembar dan jenis	200000 dan 4	200000 dan 4	200000 dan 4	200000 dan 4	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penataan arsip pegawai	giat	2	2	2	2	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan instalasi listrik	10 Item	10 Item	100%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala	unit	30	30	30	30	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan	2 Item dan 12 Bulan	2 Item dan 12 Bulan	100%

	kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional							Perundang - Undangan				
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	unit	10	10	10	10	100%	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	100%	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pembangunan gedung kantor	Terlaksannya gedung sekretariat PPNS dan garasi kendaraan	unit	2	2	2	2	100%	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi, Tersedianya makan dan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional		1	1				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC 1 PK		1	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Drone	unit	-	-	1	1	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet kantor Satpol PP dan Damkar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengadaan alat komunikasi	Tersedianya reapter	unit	-	-	1	1	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa petugas kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya perbaikan dan peninggian atap garasi		1	1	1	1	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

3	Program peningkatan disiplin aparaturnya								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	stel			136	136	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya PDL I bagi Karyawan Satpol PP	stel	70	70	70	70	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	erpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	dokumen	4	4	4	4	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				

	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	dokumen	2	2	2	2	100%	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	dokumen	2	2	2	2	100%	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terciptanya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya patroli Wilayah	100%	100%	100%
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	dokumen	2	2	2	2	100%	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Cakupan petugas Patroli Satpol PP dalam pantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban dan keindahan Kota	100%	100%	100%
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	dokumen	2	2	2	2	100%	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan kesamaptaan	12 Bulan	12 Bulan	100%

									termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP, LKPJ dan LPPD	dokumen	1	1	1	1	100%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terlaksananya perubahan renstra							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya pengumpulan informasi cukai palsu/ilegal dan pengelolaan data pelanggaran berbasis SIG	12 Bulan	12 Bulan	100%
									Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya kegiatan operasi pemberantasan penyakit masyarakat, penyuluhan pencegahan dan penegakan peraturan daerah/peraturan walikota, sidang tipiring	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				

	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga Banpol, Linmas dan petugas pengamanan obyek vital	bulan	12	12	12	12	100%	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	orang	40	40	40	40	100%	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DAN PEMBAYARAN GAJI THL	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksanannya kegiatan penertiban PKL	keg	4	4	4	4	100%					
	Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas	Terlaksanannya pengiriman Satlinmas pada Jambore Satlinmas	keg			2	2	100%					
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksanannya PAM Satpol PP, Linmas dan Damkar/ VVIP	giat	150	150	150	150	100%					
	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore trantib	giat	46	46	46	46	100%					
	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Terlaksanannya sidak / penertiban pedagang rokok	giat	12	12	12	12	100%					
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terlaksanannya rekrutmen anggota Linmas baru	orang	50	50	50	50	100%					

	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Terlaksananya pengiriman data pelanggaran secara online berbasisi SIG	giat	12	12	12	12	100%					
	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya sidang tipiring	giat	2	2	2	2	100%					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran												
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	unit	150	150	150	150	100%					
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Pembayaran petugas penanggulangan kebakaran	bulan	12	12	12	12	100%					
	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya pedoman upaya pencegahan dini bahaya kebakaran	dokumen	1	1	1	1	100%					
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Peserta Diklat penanggulangan kebakaran	orang	20	20	20	20	100%					

	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya sarana penanganan bahaya kebakaran	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	1 unit mobil tangga, 1 unit mobil rescue, 60 tabung apar, 3 fire hidrant, 2 unit kendaraan roda 3	100%					
	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksannanya Monev	giat	-	-	3	3	100%					
	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran	persen	100	100	100	100	100%					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)												
	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya sosialisasi pencegahan praktek prostitusi bagi pengusaha penginapan/hotel/losmen/tempat kos	orang	50	50	50	50	100%					

	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksananya kegiatan penyuluhan & operasional penegakan perda	giat	36	36	36	36	100%					
	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksananya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	giat	30	30	30	30	100%					
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam												
	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah leaflet informasi bencana	lembar	3000	3000	3000	3000	100%					
	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi aparaturnya Satpol PP dan solusi penanggulangan bencana	Satpol PP dan masy.	70 dan 100	70 dan 100	70 dan 100	70 dan 100	100%					
	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	orang	150	150	150	150	100%					
	Kontijensi Mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen kontinjensi mitigasi bencana banjir	dokumen	1	1	1	1	100%					

	Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	kelurahan	2	2	2	2	100%					
	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana OPD Satpol PP	jenis	6	6	6	6	100%					
	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	Kelurahan	2	2	2	2	100%					
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal												
	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya koordinasi kantrantibmas dan pengiriman KST pada gelar pasukan	giat	6	6	6	6	100%					
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi kegiatan PPNS	6 giat	6 giat	6 giat	6 giat	6 giat	100%					
	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum												
	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Terlaksananya pelatihan pengamanan Pileg dan Pilpres bagi anggota linmas	orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%					

	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	orang	650 orang	650 orang	650 orang	650 orang	100%					
	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	orang / hari	100 orang/hari	100 orang/hari	100 orang/hari	100 orang/hari	100%					

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2022 yang disusun pada tahun 2021 merupakan tahun kelima perencanaan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang periode 2016 – 2021. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi permasalahan.

Pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang pada tahun 2020 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang pada tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD***)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	-	IKK	12.08%	15.08%	17.48%		7.70%	7.70%	17.48%		
2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	-	IKK	17.64%	23.53%	35.29%	35.29%	23.53%	23.53%	35.29%	35.29%	
3	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-	IKK	3%	3%	3%	3%	4.74%	31.03%	3%		
4	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	-	IKK	100%	100%	100%		107.46%	109.36%	100%		

5	Prosentase tingkat waktu tanggap respons	-	IKK	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
6	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	-	IKK	42.50%	42.50%	47.50%		40.22%	41.39%	47.50%		
7	Cakupan tim relawan siaga bencana	-	IKK	8.82%	11.76%	11.76%		100.00%	180%	11.76%		
8	Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	-	IKK	75%	100%	100%		100.00%	100%	100%		
9	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	IKK	75%	100%	100%		49.83%	49.83%	100%		
10	Cakupan penanganan korban bencana	-	IKK	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
11	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	-	IKK	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari		3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari		

12	Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	-	IKK	95%	98%	100.00%		100%	100%	100.00%		
13	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	IKK	6.41	7.95	7.89%		16.73	3.44	7.89%		
14	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	-	IKK	13.33%	15%	16.67%		28.00%	31.82%	16.67%		
15	Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertiban dan ketertiban umum (K3)	-	IKK	96%	97%	98%		100%	100%	98%		
16	Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	-	IKK	77.27%	77.27%	77.27%		78.83%	80.22%	77.27%		
17	Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	-	IKK	17.12%	20.55%	23.97%		35.15%	35.15%	23.97%		
18	Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	-	IKK	15	18	18		6	6	18		

19	Persentase penanganan penyakit masyarakat	-	IKK	92%	94%	95%		100%	100%	95%		
20	Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	-	IKK	0	0	0		1	1	0		
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

25	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	SPM	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
----	--	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP Kota Magelang menghadapi berbagai tantangan dan kendala . Tantangan dan kendala tersebut antara lain semakin tingginya angka pelanggaran Perda sebagai konsekuensi Magelang sebagai kota jasa seiring dengan semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di kota Magelang.

➤ **Permasalahan Yang Hadapi:**

1. Belum Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Masyarakat

a. Masih kurangnya Ketertiban Umum

- Masih cukup tingginya pelanggaran terhadap produk hukum daerah;
- Kurangnya pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum;
- Kurangnya Pemberdayaan Kader Siaga Trantib;
- Jumlah PPNS di Kota Magelang yang terfasilitasi masih rendah;
- Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas
- Kurangnya pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibatranmas;
- Masih kurangnya kapasitas/kualitas SDM Satpol PP

2. Belum Optimalnya Penanggulangan dan Penanganan Bencana alam dan Kebakaran

a. Belum adanya Lembaga khusus yang menangani bencana

- Kurangnya SDM dalam penanganan dan penanggulangan bencana
- Kurangnya sarana prasarana penanganan dan penanggulangan bencana

b. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat terhadap bencana

- Belum optimalnya peran kelurahan tangguh bencana
- Masih minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan bencana dan penanggulangan bencana, serta mitigasi bencana

➤ **Isu Strategis**

1. Jumlah anggota Satpol PP yang berkurang setiap tahunnya;
2. Masih banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai kualitas standar;
3. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah;

4. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih sering terjadi;
5. Kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas masih rendah;
6. Pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat;
7. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman;
8. Kesetaraan Gender untuk Polisi Pamong Praja
9. Masih minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan bencana dan penanggulangan bencana, serta mitigasi bencana
10. Masih minimnya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana
11. Kurangnya Sarana Prasarana serta SDM dalam penanggulangan Bencana

Dalam hal ini sesuai dengan isu strategis diatas dampak yang di timbulkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
2. Banyak terjadi pelanggaran Produk hukum Daerah
3. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, baik dari Sumber Daya Manusianya maupun dari sarana prasarana penanganan penanggulangan bencana.

Tantangan dan Peluang Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah diantara lain :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas anggota Satpol PP (PNS) maupun THL Banpol Satpol PP dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda.
2. Melaksanakan deteksi dini pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota
3. Memberdayakan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)
5. Mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku.
6. Mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana
7. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta mitigasi bencana

8. Membentuk kelurahan Tangguh bencana dan membina Kelurahan Tangguh Bencana yang sudah terbentuk untuk merefresh kembali pelatihan tanggap bencana yang sudah di berikan dalam rangka penguatan ketahanan bencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Dalam rancangan awal RKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang bertanggung jawab melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang merupakan pendukung program prioritas dalam RKPD 2022.

Dalam rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan yang sangat jelas pada indikator kegiatan , hal ini disebabkan karena pada masa transisi berakhirnya RPJMD 2016-2021 maka disusun RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 sehingga penetapan indikator kinerja terus di sesuaikan dan di diskusikan Bersama Bapeda, review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14,025,149,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.790.924.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14,025,149,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.790.924.000,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)	100	7,434,334,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)	100	6.734.844.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)	100	63.490.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)	100	69.508.000,00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya dokumen renja penetapan dan renja perubahan (Dokumen)	2	6.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disusun (Dokumen)	2	7.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya dokumen RKA Penetapan (Dokumen)	1,00	3.204.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah dokumen RKA penetapan yang disusun (Dokumen)	1,00	3.204.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya RKA Perubahan (Dokumen)	1,00	3.204.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun (Dokumen)	1,00	3.204.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya DPA Penetapan (Dokumen)	1,00	546.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah DPA Penetapan yang disusun (Dokumen)	1,00	546.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya DPA Perubahan (Dokumen)	1,00	546.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah DPA Perubahan (Dokumen) yang disusun (Dokumen)	1,00	546.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan, Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD,	24,00	49.490.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK	24,00	54.508.000,00	

			Tersusunnya RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja (Laporan)					Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersusun (Laporan)			
			Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)	1,00				Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)	1,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tertib laporan kinerja dan keuangan (Persen)	100	6.705.731.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tertib laporan kinerja dan keuangan (Persen)	100	6.063.972.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pembayaran gaji dan TPP ASN (Orang)	44	6.702.731.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya (Orang)	44	6.093.392.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran (Laporan)	18	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran (Laporan)	18	3.000.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)	100	157.355.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	99.849.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan instalasi listrik (item)	10,00	3.716.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli (item)	10,00	3.716.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya makanan dan minuman pegawai (Jenis)	5	29.374.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli (Jenis)	5	29.374.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	7	6.157.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis))	7	6.157.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya bahan bacaan (Jenis)	2	2.280.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan diagendakan (Jenis)	2	2.280.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya alat kebersihan (Jenis)	19	3.470.000,00	Penyediaan Bahan/Material	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan yang dibeli (Jenis)	19	3.470.000,00	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terfasilitasinya kunjungan tamu (orang/bulan)	8	4.800.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah tamu yang terfasilitasi (orang/bulan)	8	4.800.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya makan minum rapat (Giat)	9	107.558.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (Giat)	9	50.052.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)	100	170.268.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)	100	164.025.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Jenis)	22,00	8.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli (Jenis)	22,00	8.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet Kantor Satpol PP dan Damkar (rekening)	4,00	65.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar (rekening)	4,00	65.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya jasa petugas kebersihan, Tersedianya tenaga pembuat minum (Orang)	2	97.018.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah petugas kebersihan, pembuat inum dan keamanan (Orang)	2	90.775.000,00	
			Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP (Giat)	1				Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP (Giat)	1		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terpeliharanya barang milik daerah (Persen)	100	337.490.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terpeliharanya barang milik daerah (Persen)	100	337.490.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas jabatan (Unit)	12	74.154.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar (Unit)	12	74.154.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas oprasional atau lapangan (Unit)	18	227.901.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang dibayar (Unit)	18	227.901.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA)	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya (Unit)	4,00	16.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA)	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4,00	16.000.000,00	

		MAGELANG)					MAGELANG)	(Unit)			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terpeliharanya gedung kantor (Unit)	1	19.435.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara (Unit/m2)	2/813.952 m2	19.435.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Prosentase penurunan penyakit masyarakat (persen)	3,00	4,858,303.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (persen)	100	3.554.481.000,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani (Persen)	100	4.621.778.000,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Prosentase kasus penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	3.351.303.000,00	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (persen)								
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah terciptanya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Terlaksananya patroli wilayah (Kegiatan)	598,00	2.709.584.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah petugas keamanan dan petugas pengamanan THL Banpol dan Petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui	76	1.671.075.000,00	

								perjanjian/peri katan (orang)			
			Terlaksananya pembayaran gaji THL Banpol dan tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)	76,00				Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat) PAM Event Kota Magelang (Kegiatan)	26.00		
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan cakupan petugas Patroli Satpol PP dalam pantauanndan penyelesaian pelanggaran ketertiban dan keindahan kota (Kegiatan)	64,00	714.000.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban dan keindahan kota (Kegiatan)	64.00	560.760.000,00	
						Jumlah Patroli wilayah (Kegiatan)			530		
						Jumlah Operasi penertiban (kegiatan)			20		

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah cakupan petugas dan kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta pemberdayaan Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kegiatan)	29,00	918.756.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGEL ANG)	Terciptanya SDM yang terlatih	16 kegiatan	918.756.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya kegiatan kesamapta an, serta keikutsertaan Jambore Satpol PP,dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Kegiatan)	26	279.438.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGEL ANG)	Jumlah kegiatan kesamapta an, serta keikutsertaan Jambore Satpol PP,dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Kegiatan)	26.00	191.462.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Penurunan penyakit masyarakat dan tetrlaksananya kegiatan pengelolaan data pelanggaran perda / perwal berbasis SIG (Bulan)	12	236.525.000,00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (orang)	10	9.250.000,00	

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG (Kegiatan)	6,00	10.000.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase Penegakan Perda (Persen)	100	203.178.000,00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kegiatan)	6	226.525.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pengawasan (Kegiatan)	6.00	9.652.000,00	
			Terlaksananya operasi pemberantasan penyakit masyarakat (Kegiatan)	12,00		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Kegiatan)	6.00	193.526.000,00	
			Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani (Kegiatan)	6							
			Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (Perda)	1							

			Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Orang)	10						
			Tersedianya jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (orang)	1		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	35.29	0
			Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota (Kegiatan)	18		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Pesentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	0
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana dan Tim Relawan Siaga Bencana (Kelurahan)	1	45,000,000.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase penanganan pra bencana (Persen)	100	0
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana bencana (Persen)	50	0

	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana (Giat)	1	10.000.000,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase layanan penanggulangan bencana (Persen)	100	1.501.599.000,00	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Giat)	1,00	10.000.000,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Cakupan wilayah penanggulangan wilayah (Persen)	100	1.118.249.000,00	
			Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Giat)	1,00							
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(Kelurahan Wates, KOTA MAGELANG)	Meningkatnya pengetahuan, kesiapsiagaan dan pelayanan dalam mengantisipasi bencana (Giat)	1	35.000.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Kegiatan)	36.00	1.118.249.000,00	

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	(Kelurahan Wates, KOTA MAGELANG)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kelurahan)	1	35.000.000,00			Jumlah THL Petugas Pemadam Kebakaran dan jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)	47.00		
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Bulan)	12,00		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Persen)	100	383.350.000,00	
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan Wilayah Pelayanan Penanggulangan, Penye;amatan kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran (Tahun)	1	1,687,512,000.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (kegiatan)	2	60.000.000,00	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota (persen)	100	1.639.512.000,00	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui	446	323.350.000,00	

	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							penyediaan sarana dan prasarana (RKM) (Tabung 3.5kg)			
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen)	100							
			Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (Persen)	100							
			Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (Persen)	100							
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadan Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban	36	1.639.512.000,00						

			kebakaran (Kegiatan)							
			Terbayarnya gaji THL Pemadam Kebakaran dan Tersedianya jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)	47,00						
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam pencegahan kebakaran (orang)	70	48.000.000,00					
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Meningkatkan kesiapsiagaan dan informasi penanggulangan bahaya kebakaran (orang)	70,00	48.000.000,00					
	J U M L A H				14.025.149.000,00	J U M L A H			11.790.924.000,00	

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dicantumkan dalam Renja OPD adalah mengakomodir hasil Musrenbang dan rencana kegiatan masyarakat (RKM). Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dimaknai dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat pada setiap level Musrenbang. Namun demikian tidak semua hasil musrenbang dapat diakomodir, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maupun tingkat kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Selain itu yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah adalah terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai tahun 2021, sehingga mempengaruhi perencanaan kegiatan di tahun anggaran 2022.

Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahun 2021 untuk perencanaan tahun 2022 ada beberapa yang sudah masuk dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, dan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) sudah diakomodir oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun tetap di sesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah. Disamping itu aspirasi dari masyarakat tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga telah tercantum dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Berikut usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan :

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Magelang**

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan/Pemang- ku kepentingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.862.865.000	Sekretariat Satpol PP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12.862.865.000	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)	6,825,225,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)	63.490.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya dokumen renja penetapan dan renja perubahan (Dokumen)	6.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya dokumen RKA Penetapan (Dokumen)	3.204.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya RKA Perubahan (Dokumen)	3.204.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya DPA Penetapan (Dokumen)	546.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersusunnya DPA Perubahan (Dokumen)	546.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan, Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD, Tersusunnya RfK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja (Laporan)	49.490.000,00	
			Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tertib laporan kinerja dan keuangan (Persen)	6.096.392.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pembayaran gaji dan TPP ASN (Orang)	6.093.392.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	(Satuan Polisi Pamong)	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan	3.000.000,00	

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Praja, KOTA MAGELANG)	bulanan/triwulanan/semesteran (Laporan)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)	157.355.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan instalasi listrik (item)	3.716.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya makanan dan minuman pegawai (Jenis)	29.374.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Jenis)	6.157.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya bahan bacaan (Jenis)	2.280.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya alat kebersihan (Jenis)	3.470.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terfasilitasinya kunjungan tamu (orang/bulan)	4.800.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya makan minum rapat (Giat)	107.558.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)	170.498.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Jenis)	8.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet Kantor Satpol PP dan Damkar (rekening)	65.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya jasa petugas kebersihan, Tersedianya tenaga pembuat minum (Orang)	97.248.000,00	

			Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP (Giat)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terpeliharanya barang milik daerah (Persen)	337.490.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas jabatan (Unit)	74.154.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terlaksananya pemeliharaan, perpanjangan STNK dan KIR dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas oprasional atau lapangan (Unit)	227.901.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya (Unit)	16.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Terpeliharanya gedung kantor (Unit)	19.435.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Indeks peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (persen)	3,997,666,000.00	BIDANG TRANTIBUM LINMAS
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Persen)	3.799.506.000,00	
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (Persen)		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah patroli wilayah (Kegiatan)	1.926.144.000,00	
			Jumlah petugas keamanan dan petugas pengamanan THL Banpol dan petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)		
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pantauan dan penyelesaian pelanggaran	701.920.000,00	

	Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Praja, KOTA MAGELANG)	ketertiban dan keindahan kota (Kegiatan)		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (orang)	918.756.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan kesamaptaan, serta keikutsertaan Jambore Satpol PP, dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Kegiatan)	243.436.000,00	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (orang)	9.250.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persen)	198.160.000,00	BIDANG GAKDA
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pengawasan (Kegiatan)	9.652.000,00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (Kegiatan)	188.508.000,00	
			Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani (Kegiatan)		
			Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (Perda)		
			Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Orang)		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana dan Tim Relawan Siaga Bencana (Persen)	120.000.000,00	PRA BPBD
			Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (orang)		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Persen)	20.000.000,00	

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Kegiatan)	20.000.000,00	
			Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Persen)		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persen)	70.000.000,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	(Kelurahan Wates, KOTA MAGELANG) (Kelurahan Kota Magelang)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kelurahan dan kegiatan)	70.000.000,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	30.000.000,00	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	30.000.000,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Indeks Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Persen)	1,919,974.000,00	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Persen)	1.859.974.000,00	
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Persen)		
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Persen)		
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan / atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat		

			Daerah (Persen)		
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Kegiatan)	1.407.021.000,00	
			Jumlah THL Petugas Pemadam Kebakaran dan jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Tersedianya Tabung Alat pemadam kebakaran (Tabung)	452.953.000,00	MUSRENBANG
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Persen)	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (kegiatan)	60.000.000,00	MUSRENBANG

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersebut dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b “Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat” sehingga dalam hal ini Kepala Daerah memerlukan perangkat kerja yang dapat mendukung serta melaksanakan amanat Pasal 65 tersebut diatas.

Sebagai tindak lanjut tugas tersebut diatas, maka Kepala Daerah melalui pasal 225 ayat (1) “ Dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah masing – masing yang fungsinya sama, yakni memposisikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegakan Perda di Daerah.

Melalui Penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Keberadaan dan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Magelang telah mendukung terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi. Program – Program tersebut antara lain Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah: “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”. Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat.

Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

Tersirat dalam persandingan visi tersebut bahwa mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju merupakan salah satu kondisi menuju kemandirian daerah, yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Tengah terkait kemandirian daerah. Kesehatan dan kebahagiaan masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini selaras dan mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk lebih membuat sejahtera masyarakatnya. Sedangkan dalam persandingan dengan kebijakan tingkat nasional, menjadikan Magelang sebagai kota yang maju selaras dengan mewujudkan Indonesia maju. Masyarakat Kota Magelang yang lebih sehat dan bahagia menjadi modal yang kuat dalam mengembangkan kepribadian diri berlandaskan nilai-nilai etika dan budaya lokal. Semangat untuk saling membantu dalam lingkungan yang toleran akan menumbuhkan jiwa gotong royong, dan kondisi tersebut mencerminkan dukungan terhadap kebijakan nasional.

Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2005- 2025, Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari Tema Tahap Ke-4 RPJPD, yaitu tahun 2020-2025. Tema yang diamanatkan adalah:

- Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh di Berbagai Bidang;
- Mewujudkan Tercapainya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi, Berlandaskan Budaya Yang Unggul, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Mandiri, serta;
- Mewujudkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Masyarakat Madani.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Dari rumusan visi: “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia” yang menyiratkan adanya 2 (dua) dimensi yang akan diwujudkan, yaitu dimensi membangun wilayah kota dan membangun masyarakatnya, maka untuk mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju ditempuh melalui misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif, serta misi ke-5 yaitu Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur. Sedangkan untuk mewujudkan Magelang sebagai kota sehat, dilaksanakan melalui misi ke-2, yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi ke-2 tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih sehat. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Magelang menjadi lebih bahagia ditempuh melalui pelaksanaan misi ke-1, yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq, misi ke-2 yaitu

Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan misi ke-4, yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Sebagai tindak lanjut misi adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, sedangkan sasaran adalah rumusan mengenai keadaan yang menggambarkan tercapainya tujuan. Uraian penjabaran misi ke tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- Misi ke-1: Mewujudkan Masyarakat yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq. Misi ini memiliki tujuan Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya, sedangkan sebagai sasaran adalah 1) Meningkatnya penguatan toleransi, 2) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, 3) Meningkatnya stabilitas daerah, 4) Meningkatnya penguatan kebudayaan, dan 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

- Misi ke-2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi kedua ini mempunyai tujuan yaitu Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Sasaran dari tujuan ini antara lain 1) Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing, 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dan 3) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan.

- Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Tujuan misi ketiga ini adalah: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, 2) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, profesionalitas, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan, dan 3) Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur.

- Misi ke-4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Misi ke 4 mempunyai 2 tujuan. Tujuan pertama yaitu: Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Inklusif, dengan sasaran adalah: Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan sektor ekonomi riil yang berkualitas, merata dan berkeadilan. Tujuan kedua yaitu: Meningkatnya daya saing Magelang sebagai pusat pelayanan jasa dengan sasaran Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, kesehatan, Pendidikan dan pariwisata.

- Misi ke-5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur. Misi ke 5 mempunyai 2 tujuan, yaitu Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan, dengan sasarannya adalah: 1) Meningkatkan cakupan infrastruktur dengan kondisi baik, 2) Meningkatnya cakupan penyelenggaraan penataan ruang yang akuntabel, 3) Meningkatnya

aksesibilitas sarana perkotaan, 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan 5) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah: Meningkatnya ketahanan daerah. Sebagai sasaran adalah: 1) Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan 2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Adapun Tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah “**Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum**” dan “**Meningkatnya ketahanan terhadap bencana**”

Dan dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Menurunnya Jumlah Korban Akibat Bencana.
2. Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran.
3. Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana

Dalam menetapkan tujuan sasaran tidak lepas dari visi dan misi Walikota Wakil Walikota terpilih tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan awal RPJMD urusan wajib Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja ada pada misi ke 1 “ Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq “ dan Misi ke 5 “Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur “

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan Kegiatan .

Dalam merumuskan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sangat-sangat memperhatikan faktor-faktor antara lain :

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam dalam menetapkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari visi dan misi Walikota Wakil Walikota terpilih tahun 2020. Demikian juga dalam menetapkan program dan kegiatan, adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Wakil Walikota terpilih tahun 2020.

- 2) Pencapaian tujuan dan Indikator SDG,s .

Dalam pewujudan tujuan SDG,s , Satuan Polisi Pamong Praja berada pada Pilar Sosial, yang berusaha mengurangi angka kemiskinan yang terdampak akibat terjadinya Bencana, yakni antara lain dengan pemenuhan segala bentuk dokumen penanggulangan bencana , pembentukan dan penguatan Kelurahan Tangguh Bencana dan sebagainya.

3). Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah untuk bisa di capai Pemerintah Daerah khususnya pada Pelayanan Dasar salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, maka Satpol PP Kota Magelang melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4). Berbasis Gender

Disamping itu, program/kegiatan perencanaan berbasis gender berdampak langsung bagi masyarakat yang ada di Satpol PP Kota Magelang adalah :

1. Sub Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

b. Uraian Garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan ,

Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 antara lain :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*, dengan kegiatan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. *Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, dengan kegiatan yaitu :
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sub Kegiatan :
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. *Program Penanggulangan Bencana*, dengan kegiatan yaitu :
- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Daerah Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan :

- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
- Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
- Pengebangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Sub Kegiatan :

- Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit / wabah zoonis prioritas
- Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota

4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan yaitu :

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sesuai dengan Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, maka Satpol PP Kota Magelang melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA MAGELANG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11,790,924,000.00				0.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11,790,924,000.00				0.00	
1.	1.05.1-5.0-0.0- 0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)	100	6,734,844,000.00				0.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0- 0.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)	100	69.508.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	Satuan Polisi Pamong Praja

	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disusun (Dokumen)	2		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Penetapan yang disusun (Dokumen)	1,00	3.204.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1		- Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun (Dokumen)	1,00	3.204.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1		- Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun (Dokumen)	1,00	546.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1		- Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan (Dokumen) yang disusun (Dokumen)	1,00	546.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1		- Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersusun (Laporan)	24,00	54.508.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24,00		- Satuan Polisi Pamong Praja
	Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan (Orang)	1,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,00		

1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib laporan kinerja dan keuangan (Persen)	100	6.063.972.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya (Orang)	44,00	6.060.972.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	44,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	Satuan Polisi Pamong Praja

			Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran (Laporan)	18		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18		
1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	99.849.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli (item)	10,00	3.716.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli (Jenis)	5	29.374.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan diagendakan (Jenis)	7	6.157.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Enis dan jumlah bahan bacaan yang disediakan (Jenis)	2	2.280.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan/Material				3.470.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	Satuan Polisi Pamong Praja

		Jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan yang dibeli (Jenis)	19		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19		
		Fasilitas Kunjungan Tamu		4.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah tamu yang terfasilitasi (orang/bulan)	8		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.052.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan (Giat)	9		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.025.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran (Persen)	100		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli (Jenis)	22,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22,00		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		65.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar (rekening)	4,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4,00		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		90.775.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja

		Jumlah petugas kebersihan, pembuat inum dan keamanan (Orang)	3		(Satpol PP Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3		
		Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP (Giat)	1		(Satuan Polisi Pamong Praja)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1		
1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah (Persen)	100	337.490.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar (Unit)	12	74.154.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang dibayar (Unit)	18	227.901.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	4,00	16.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	19.435.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1	-	Satuan Polisi Pamong Praja

2.	1.05.1-5.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (persen)	100	3,554,481,000.00				0.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum (Persen)	100	3.351.303.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar	76,00	1.671.075.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	76,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat) (Kegiatan)	26,00		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26,00		
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			560.760.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	Satuan Polisi Pamong Praja

		Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat	752		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	752		
		Jumlah Patroli wilayah (Kegiatan)	530						
		Jumlah Operasi penertiban (kegiatan)	20						
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		918.756.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Terciptanya SDM yang terlatih (Kegiatan)	16		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		191.462.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah kegiatan kesamaptaaan serta keikutsertaan Jambore Satpol PP, dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Kegiatan)	26.00		(Satuan Polisi Pamong Praja)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26.00		
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		9.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan hukum perda dan perkada (orang)	10		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10		
1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		203.178.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			- Satuan Polisi Pamong Praja

			Presentase Penegakan Perda (Persen)	75		(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100		
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kegiatan)	6.00	9.652.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	6.00	193.526.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	1.05.1-5.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana (Persen)	100	0.00				94.000.000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Persen)	100	-	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)		100	11.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase penanganan pra bencana (Persen)	100	-	(Kelurahan Wates, KOTA MAGELANG)		100	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Persen)	100	-	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)		100	33.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

4.	1.05.1-5.0-0.0-0.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (Persen)	100	1,501,599,000.00				0.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase waktu tanggap kebakaran dan waktu tanggap penyelamatan (Persen)	100	1.118.249.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Kegiatan)	36.00	1.118.249.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	36.00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah THL Petugas Pemadam Kebakaran (Orang)	47.00		(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	47.00		
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah alat pemadam kebakaran yang tersedia							
			Jumlah alat pelindung diri yang tersedia							
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			383.350.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	Satuan Polisi Pamong Praja

		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Persen)	100		(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran (kegiatan)	2	60.000.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana prasarana	446,00	323.350.000,00	(Satuan Polisi Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	446,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	J U M L A H			11.790.924.000,00				94.000.000,00	

Pada perencanaan anggaran kegiatan tahun 2022 rencana kerja anggaran program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang telah di susun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagai berikut :

TABEL 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA MAGELANG**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05						5,969,061,000						5,941,219,000		
1	05	01					4,365,793,000						4,050,219,000		
1	05	01	2.01				25,000,000						30,177,000		
1	05	01	2.01	01			2 Dokumen	14,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM/tenaga kerja	2 Dokumen	18,427,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	2.01	02			1 Dokumen	3,204,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Peningkatan ketahanan daerah	1 Dokumen	3,204,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
		disusun (Dokumen)						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum												
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)				1 dokumen	3,204,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun (Dokumen)					546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah			0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun (Dokumen)				1 Dokumen	546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Dokumen	546,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lapora capaian kinerja dan realisasi kinerja				24 laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		24 laporan	3,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah				1 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Kegiatan	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,035,643,000									3,820,196,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan TPP ASN				12 Bulan	4,034,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan daerah		12 Bulan	3,760,271,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, laporan pertanggungjawaban yang tersusun				9 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan daerah		9 Kegiatan	59,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				1 Dokumen	1,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan daerah		1 Dokumen	925,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						73,461,000							67,646,000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli				1 Paket	1,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Paket	1,128,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah Jumlah peralatan Rumah tangga yang dibeli				1 Paket	2,238,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Paket	2,238,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli				5 Jenis	9,358,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		5 Jenis	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang di cetak dan digandakan				5 Jenis	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		5 Jenis	2,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang tersedia				2 Jenis	2,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		2 Jenis	2,280,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat koordinasi				5 Kegiatan	53,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		5 Kegiatan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115,842,000							84,200,000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli				22 item	11,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		22 item	11,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar				4 Jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan ketahanan daerah		4 Jenis	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Alokasi Umum						
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan				1 orang	54,622,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	1 orang	23,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah					115,847,000						48,000,000		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ijin kendaraan perorangan atau dinas operasional yang dibayar				3 giat	92,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	3 giat	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				4 Unit	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	4 Unit	13,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	10,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	1 Unit	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana					1,603,268,000						1,891,000,000		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga negara yang					20,000,000						20,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		memperoleh layanan informasi rawan bencana													
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana				150 orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		150 orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase penanganan pra bencana					1,362,158,000							976,000,000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kegiatan	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Kegiatan	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 orang	1,093,927,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		100 orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan				50 Jenis	122,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		50 Jenis	421,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan				30 orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan ketahanan daerah		30 orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Semua Kelurahan	Alokasi Umum							
1	05	03	2.02	07			25 Rumah	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		25 Rumah	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08				45,881,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah			30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03					221,110,000							895,000,000	
1	05	03	2.03	01			12 Bulan	81,829,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		12 Bulan	182,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	02			12 Kegiatan	20,081,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		12 Kegiatan	182,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	03			1 orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan logistic yang terpenuhi dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota				100 Persen	89,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		100 Persen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL							5,969,061,000							5,941,219,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5,969,061,000							5,941,219,000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku (persen)					4,365,793,000							4,050,219,000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja (Persen)					25,000,000							30,177,000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi				2 Dokumen	14,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan kompetensi dan daya saing		2 Dokumen	18,427,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		renstra yang disusun (Dokumen)						Semua Kelurahan	Alokasi Umum		SDM/tenaga kerja				
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Penetapan yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	3,204,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	1 Dokumen	3,204,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1 dokumen	3,204,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	1 dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun (Dokumen)		546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	1 Dokumen	546,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	24 laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah	24 laporan	3,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan ketahanan daerah	1 Kegiatan	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Alokasi Umum						
1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,035,643,000						3,820,196,000		
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan TPP ASN			12 Bulan	4,034,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan daerah		12 Bulan	3,760,271,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, laporan pertanggungjawaban yang tersusun			9 Kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan daerah		9 Kegiatan	59,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun			1 Dokumen	1,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan daerah		1 Dokumen	925,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					73,461,000						67,646,000		
1 05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli			1 Paket	1,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Paket	1,128,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah Jumlah peralatan			1 Paket	2,238,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer		Peningkatan ketahanan daerah		1 Paket	2,238,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
		Rumah tangga yang dibeli						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum											
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli				5 Jenis	9,358,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		5 Jenis	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang di cetak dan digandakan				5 Jenis	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		5 Jenis	2,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang tersedia				2 Jenis	2,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		2 Jenis	2,280,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat koordinasi				5 Kegiatan	53,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		5 Kegiatan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115,842,000								84,200,000	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli				22 item	11,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		22 item	11,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar				4 Jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		4 Jenis	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan				1 orang	54,622,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 orang	23,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah					115,847,000							48,000,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ijin kendaraan perorangan atau dinas operasional yang dibayar				3 giat	92,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		3 giat	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				4 Unit	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		4 Unit	13,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	10,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Unit	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana					1,603,268,000							1,891,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					20,000,000						20,000,000		
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana				150 orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		150 orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase penanganan pra bencana					1,362,158,000							976,000,000	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kegiatan	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 Kegiatan	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Warga negara yang mendapat pelayanan pUSDalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100 orang	1,093,927,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		100 orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan				50 Jenis	122,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		50 Jenis	421,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan				30 orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		30 orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota				25 Rumah	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		25 Rumah	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					45,881,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah			30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					221,110,000							895,000,000	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB				12 Bulan	81,829,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		12 Bulan	182,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Darurat Bencana				12 Kegiatan	20,081,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		12 Kegiatan	182,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				1 orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		1 orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan logistic yang terpenuhi dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota				100 Persen	89,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan ketahanan daerah		100 Persen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL							5,969,061,000							5,941,219,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan program pembangunan diperlukan pendanaan yang cukup agar program dapat terlaksana dengan baik. Namun realitanya, anggaran pemerintah daerah yang ada terbatas untuk memenuhi pelaksanaan semua kegiatan pembangunan. Untuk itu, diperlukan penentuan prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam hal ini, proyeksi belanja diperlukan untuk memperkirakan kemampuan anggaran dalam kemampuan untuk membiayai program pembangunan.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki pagu **Rp.11.790.924.000,00** dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah di sajikan pada BAB III Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022.

Sedangkan Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kota Magelang memiliki pagu **Rp.5.969.061.000,00** dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah di sajikan pada BAB III

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan tahun 2022, dengan usulan pagu setiap kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam Renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang muncul dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya, yang akan dilaksanakan ditahun berjalan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Mengingat dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022 disusun dengan mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang dan forum OPD yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2022.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

3. Sekretaris dan Bidang yang berada dalam lingkup perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan RKA Tahun 2022 dengan berpedoman pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Dengan situasi yang aman, tertib dan teratur, diharapkan pembangunan di Kota Magelang dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas Pendidikan, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat lebih **Maju, Sehat dan Bahagia**.

Demikian Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

Magelang,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

Drs. SINGGIH INDRI PRANGGANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620401 198907 1 001

